



Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah)

The Influence of Economic Growth, Local Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditure (Survey of District and City Governments in Central Sulawesi)

Dasa Febriyanti^{1*}, Suwedy², Marwana³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu

*Corresponding Author: febriyantdasa@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 8 July, 2024

Revised: 8 August, 2024

Accepted: 15 August, 2024

Kata Kunci:

Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Daerah, Dana
Alokasi Umum Dana Alokasi
Khusus, Biaya Modal

Keywords:

Millennial Consumer
Behavior, Sustainable
Products, Purchase Decision

DOI: 10.56338/jks.v7i8.5954

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dampak simultan dan parsial dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi spesifik terhadap beban modal di pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap beban modal (survei di Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah). Ini ditunjukkan oleh R-square 0,760 atau 76, % dan F-change 27,642 pada level signifikan 0,000. Di antara 4 variabel tersebut, ditemukan bahwa dana alokasi umum merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi belanja modal di pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai t 9,713 pada tingkat signifikan 0,000. Sebagian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap beban modal dengan t-value -2,357 signifikan di level 0,024. Laba asli daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap beban modal dengan nilai t -3,385 pada level signifikan 0,703. Sementara itu, dana alokasi spesifik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap beban modal dengan nilai t sebesar 0,952 pada level signifikan 0,348.

ABSTRACT

This research aims to investigate and analyze simultaneous and partial effects of economy growth, regional original income, general allocation fund and specific allocation fund on capital expense at regency/city regional government in central Sulawesi Province. This is a qualitative and quantitative research approach using descriptive analysis and multiple linear regression. The result show that economy growth, regional original income, general allocation fund and specific allocation fund perform positive and significant effect on capital expense (a survey at regency/city regional government in central Sulawesi Province). This is indicated by R-square 0.760 or 76.% and F-change 27.642 at the significant level of 0.000. Among those 4 variables, it is found that general allocation fund is the most dominant variable effecting capital expense at regency/city regional government in Central Sulawesi Province with t-value 9.713 at the significant level of 0.000. Partially, economy growth performs negative but not significant effect on capital expense with t-value of -2.357 significant at the level of 0.024. Regional original income performs negative but not significant effect on capital expense with t-value of -3.385 at the significant level of 0.703. Meanwhile, specific allocation fund perform positive but not significant effect on capital expense with t-value of 0.952 at the significant level of 0.348.

PENDAHULUAN

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah ditentukan terhadap pemerintah dalam menciptakan good governance sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya dan pengalokasian sumberdaya yang merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB berdasarkan harga berlaku. Dalam produk domestik regional bruto PDRB Sulawesi Tengah tahun 2007, menyebutkan 9 sektor-sektor ekonomi dalam PDRB antara lain; 1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3) Sektor Industri dan Pengolahan; 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5) Sektor Bangunan; 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9) Sektor Jasa-jasa.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan

sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potesnsi fiskal pemrintah daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Hasil penelitian yang dilakukan Darwanto (2007) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dengan demikian bahwa desntralisasi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Keterbatasan infra struktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD terhadap anggaran belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat?

Studi Abdullah (2004) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Menurut (Setiaji, 2007 dalam Bati, 2009) perbedaan pertumbuhan PAD tidak diikuti dengan kenaikan share (kontribusi) PAD terhadap anggaran belanja modal dan peningkatan PAD tidak sebanding dengan peningkatan total belanja mereka.

Dana Alokasi Umum, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting.

Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Selain pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK juga memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena DAK ini juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se- Sulawesi Tengah)? (2) Apakah Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se- Sulawesi Tengah) ? (3) Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah)? (4) Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah)? (5) Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah)?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah); 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Signifikan Terhadap /Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah); 3) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah); 4) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se- Sulawesi Tengah); 5) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, yaitu data terukur berupa angka-angka, maupun jumlah dimana dalam penelitian ini data tersebut berupa data realisasi PDRB, PAD, DAU, DAK serta Belanja Modal masing-masing Kabupaten dan Kota yang ada Se-Sulawesi Tengah. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Cara pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota se-sulawesi tengah. Dari jumlah populasi tersebut tidak semuanya menjadi responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menarik sampel menjadi 9 kabupaten dan 1 kota, pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan (*judgement Sampling*). Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penelitian dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 1) Daerah kabupaten dan kota Se- Sulawesi Tengah yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2008-2011; 2) Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang tidak dimekarkan pada kurun waktu tahun 2008-2011.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dan dianalisa dengan program *SPSS for windows versi 16.0*. Model persamaan regresi bila dua atau lebih variabel independen prediktor, dengan formulasi sebagai berikut (Setiaji, 2004).

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n + e$$

Dimana :

- Y = Belanja Modal
- b₀ = Konstanta (intercep)
- X₁ = Pertumbuhan Ekonomian
- X₂ = Pendapatan Asli Daerah
- X₃ = Dana Alokasi Umum
- X₄ = Dana Alokasi Khusus
- e = Kesalahan Pengganggu (error)

HASIL

Berdasarkan penelitian yang meneliti 10 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah yang memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan pada kurun waktu penelitian dari tahun 2008 sampai dengan 2011, dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis deskriptif variabel Pertumbuhan Ekonomi (X₁)

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2008-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Daerah Kabupaten dan Kota Se – Sulawesi Tengah									
	Bangk ep	Bangg ai	Moro wali	Poso	Dongg ala	Toli- toli	Buol	Parim o	Tojo Una- una	Palu
2008	1,137,849	2,848,872	2,696,128	1,632,011	2,798,887	2,024,198	999,775	4,851,014	893,280	4,655,152
2009	1,302,	3,414,	2,981,	1,861,	3,224,	2,341,	1,139,	5,514,	1,052,	5,332,

9	584	639	838	806	968	191	673	609	828	677
2010	1,494,579	4,131,054	3,716,008	2,131,797	3,743,571	2,694,793	1,307,509	6,346,245	1,201,613	6,145,475
2011	1,718,949	5,015,950	4,590,684	2,461,703	4,409,504	3,100,787	1,505,070	7,246,794	1,376,063	7,110,615

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 daerah kabupaten dan kota Se- Sulawesi Tengah, secara keseluruhan untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pada setiap kabupaten dan kota sangat terlihat jelas bahwa setiap tahun pertumbuhan ekonomi untuk setiap kabupaten dan kota mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, ini sangat jelas pada tabel diatas. Peningkatan ini tidak luput dari bantuan para masyarakat yang mana setiap kabupaten dan kota memiliki mata pencarian yang berbeda-beda sehingga peningkatan untuk setiap kabupaten dan kota masih didominasi oleh para nelayan, petani, perkebunan, peternak, sektor perdagangan, restoran, hotel dan sektor-sektor jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan perekonomian masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

Analisis deskriptif Variable Pendapatan Asli Daerah (X₂)

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2008-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Daerah Kabupaten dan Kota Se - Sulawesi Tengah									
	Bangkep	Banggai	Morowali	Poso	Donggala	Tolitoli	Buol	Parimo	Tojo Una-una	Palu
2008	12.128	23.043	7.595	14.406	19,165	14.334	13.363	11.811	17.084	38.198
2009	10,424	24.295	13.508	23.042	33,870	19.665	7.705	10.342	19.538	51.946
2010	6,505	25.045	12.193	17.653	23,311	13.131	12.651	13.224	19.995	56.895
2011	9,374	35.337	20.431	25.654	30,238	16.655	8.633	20.578	23.022	78.348

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum PAD yang diperoleh dari 10 daerah kabupaten dan kota Se-Sulawesi Tengah, secara keseluruhan untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 didominasi dari sektor pajak, kemudian disusul oleh sektor retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan terakhir dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan tabel diatas sangat jelas bahwa tidak semua kabupaten mengalami peningkatan melainkan ada juga yang mengalami penurunan. Dari tabel diatas sangat jelas bahwa kota palu yang memiliki PAD tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. PAD ini terutama berasal dari sektor pajak, retribusi, lain-lain PAD yang sah serta kekayaan PAD yang dipisahkan, kota palu merupakan ibu kota dari sulawesi tengah. Kota palu sangat memungkinkan untuk menggali PAD-nya dari sektor pajak sebab melihat kondisi kota palu yang mulai berkembang pesat sehingga dengan keadaan tersebut bisa menjadi peluang bagi kota palu untuk menggali pajak daerah terutama dari pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, dan sebagainya.

Akan tetapi tidak semua pemerintah daerah bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan di ibu kota. Berbeda pada setiap daerah tidak bisa mendapatkan PAD yang besar karena setiap

daerah memiliki potensi dan tingkat kemandirian yang berbeda pula. Setiap daerah pula terdapat perbedaan dalam mengandalkan sumber pendapatan bagi masing-masing daerah. Hal ini dapat dikarenakan kondisi geografis yang berbeda, jumlah penduduk, keadaan demografi yang beragam dan sebagainya.

Penurunan dan peningkatan yang terjadi pada masing-masing kabupaten dan kota se-sulawesi tengah selama tahun tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda kemudian dari sisi personalnya berbeda pula dan setiap daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya yang dimiliki setiap kabupaten sangat berbeda.

Analisis deskriptif Variable Dana Alokasi Umum (X_3)

Tabel 3. Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2008-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Daerah Kabupaten dan Kota Se - Sulawesi Tengah									
	Bangka	Banggai	Morowali	Poso	Donggala	Tolitoli	Buol	Parimo	Tojo Una-una	Palu
2008	260,478	436.511	373.308	373.308	502,872	304.613	254.34	363.764	249.998	249.998
2009	260,323	449.171	368.918	368.918	88,617	307.431	258.6	365.471	263.96	263.96
2010	273,612	474.875	393.928	393.928	351,934	351.739	299.4	384.004	273.095	273.095
2011	323,380	504.06	435.729	435.729	392,154	319.134	328.94	447.59	310.268	310.268

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Pada 10 kabupaten dan kota se-sulawesi tengah, secara keseluruhan untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pada setiap kabupaten dan kota sangat jelas terlihat pada tabel diatas bahwa tidak semua kabupaten mengalami peningkatan melainkan ada juga yang mengalami penurunan. Pada setiap daerah yang mengalami peningkatan DAU disebabkan peningkatan alokasi DAU setiap tahunnya besar, disatu sisi kebutuhan akan alokasi pembiayaan gaji aparatur PNS setiap tahunnya juga naik sehingga membutuhkan dana alokasi umum yang cukup besar. Pada kenyataannya pemerintah daerah dapat meminimalisir bantuan dana alokasi umum tersebut apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan fiskalnya yang salah satunya dapat dilakukan melalui penggalan PAD yang lebih besar.

Sedangkan pada pemerintah daerah yang mengalami penurunan di tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pada masing-masing kabupaten dan kota se-sulawesi tengah dapat dilihat dari fungsi daerah dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan kota serta pada setiap daerah yang memiliki DAU yang rendah maka pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah besar sehingga penerimaan dana alokasi umum yang diperoleh dari pemerintah pusat sangat rendah karena daerah tersebut bisa membiayai daerahnya dengan pendapatan asli daerah yang dimiliki tanpa memperoleh bantuan dana alokasi umum dari pemerintah pusat.

Analisis deskriptif variabel Dana Alokasi Khusus (X₄)

Tabel 4. Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2008-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Daerah Kabupaten dan Kota Se - Sulawesi Tengah									
	Bangkep	Banggai	Morowali	Poso	Donggala	Tolitoli	Buol	Parimo	Tojo Una-una	Palu
2008	54.82	54.82	53.139	68.642	76,604	51.226	45.182	51.942	49.618	44.138
2009	47.554	47.554	43.254	68.54	64,018	47.44	52.948	68.958	49.782	46.23
2010	33.12	33.12	40.79	40.261	51,916	39.445	35.529	43.905	43.2	26.929
2011	48.543	48.583	48.483	57.437	65,281	47.497	45.506	70.237	55.069	39.201

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 daerah kabupaten dan kota Se-Sulawesi Tengah, secara keseluruhan untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pada setiap kabupaten dan kota sangat jelas terlihat bahwa tidak semua kabupaten mengalami peningkatan melainkan ada juga yang mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi pada masing-masing kabupaten yang mengalami penurunan yaitu dikarenakan ada beberapa bidang tidak maksimal dananya dipergunakan melainkan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai dengan kegiatan pemerintah daerah sehingga setiap daerah ini tidak merasakan secara maksimal infrastruktur yang ada di setiap daerah akan tetapi kembali lagi kepada masing-masing pemerintah daerah kabupaten dalam mengelolah anggaran dana alokasi khusus apakah secara maksimal atau tidak maksimal dalam mengelola DAK-nya karena akan berdampak pada masyarakat yang akan merasakannya.

Sedangkan peningkatan yang terjadi di tahun 2008 samapai tahun 2011 pada masing-masing kabupaten dan kota se-sulawesi tengah yang mengalami peningkatan dikarenakan dana alokasi khususnya telah dipergunakan secara maksimal dan sesuai dengan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Peningkatan ini dikarenakan setiap daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan penempatan sumber daya manusianya sesuai dengan bidang yang dimiliki sehingga pengelolaan setiap bidang-bidang dana alokasi khusus sudah sesuai apa yang diharapkan pemerintah daerah sehingga setiap infrastruktur setiap daerah dapat dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

Analisis deskriptif variabel Belanja Modal (Y)

Tabel 5. Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2008-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Daerah Kabupaten dan Kota Se - Sulawesi Tengah									
	Bangkep	Banggai	Morowali	Poso	Donggala	Tolitoli	Buol	Parimo	Tojo Una-una	Palu
2008	179.251	185.03	213.544	115.151	172,675	148.234	95.058	161.254	150.446	117.732
2009	215.575	183.224	165.047	152.167	79,607	115.759	167.77	128.482	185.627	139.081

2010	166.31 9	149.29 1	179.678	100.9 73	121,75 7	56.727	107.1 3	124.4 66	117.6 44	105.4 8
2011	154.34 8	122.89 7	124.021	136.2 5	171.70 2	118.89 4	158.4	103.7 97	129.9 58	96.14 6

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana daerah, selain itu juga untuk mendapatkan aset tetap daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 kabupaten dan kota se-sulawesi tengah memiliki belanja modal yang berfluktuasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Peningkatan belanja modal yang terjadi pada masing-masing kabupaten dan kota se-sulawesi tengah dikarenakan lebih banyak mengalokasikan belanja kepada belanja modal dan maka dari itu pemerintah daerah perlu menambah belanjanya terutama belanja modal untuk kepentingan pengadaan sarana dan prasarana daerah sehingga pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat setiap daerah karena penyediaan sarana dan parasana pada masing-masing kabupaten dan kota sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan sehingga belanja modal yang dimiliki setiap daerah sudah maksimal dalam menggunakan belanja modal.

Sedangkan penurunan yang terjadi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pada masing-masing kabupaten dan kota se-sulawesi tengah dikarenakan pemerintah daerah belum stabil dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana serta kemungkinan memang kebutuhan sarana dan prasaran setiap daerah tidak terlalu besar sehingga adanya kekhawatiran bahwa dengan tingginya belanja modal dapat memicu pula biaya rutin lainnya seperti biaya pemeliharaan.

Analisis Regresi Linear berganda

Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Variabel Regresi	Beta	t hitung	Sig
Constanta	1.196	0.073	0.942
PDRB (X ₁)	-0.230	-2.357	0.024
PAD (X ₂)	-0.038	-0.385	0.703
DAU (X ₃)	0.848	9.713	0.000
DAK (X ₄)	0.082	0.952	0.348
R	:0,872	F hitung	: 27.642
R Square	:0,760	Sig	:0,000

Sumber: Data Diolah,2013.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Full Model Regression diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.196 + (-0,230) X_1 + (-0,038) X_2 + 0,848 X_3 + 0,082 X_4$$

Persamaan model regresi linier berganda diatas terdapat nilai koefisien regresi variabel bebas (X) adalah ada yang positif dan ada yang negatif. Nilai koefisien X₁ dan X₂ bernilai negatif artinya apabila terjadi perubahan pada variabel X akan menyebabkan perubahan berbanding terbalik pada variabel Y sedangkan variabel X₃ dan X₄ bernilai positif ini berarti apabila terjadi perubahan pada variabel X, akan menyebabkan perubahan secara searah pada variabel Y. Model persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 1.196 artinya apabila nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bernilai nol, maka Belanja Modal sebesar 1.196.

Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB harga berlaku tidak berpengaruh positif melainkan berpengaruh negatif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar $-0,230$, artinya setiap penambahan 1 satuan pertumbuhan ekonomi. maka akan menurunkan anggaran belanja modal sebesar 0.230 satuan.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar -0.038 , artinya setiap penambahan 1 satuan variabel PAD akan menurunkan anggaran belanja modal sebesar -0.038 satuan.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar $0,848$, artinya setiap penambahan 1 satuan variabel DAU akan menaikkan belanja modal sebesar 0.848 satuan.

Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien sebesar $0,082$ artinya setiap penambahan 1 satuan variabel DAK akan menurunkan belanja modal sebesar $0,082$ satuan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah) dapat diterima.

Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai R square sebesar $0,760$ atau $76,0\%$ dan nilai F Change sebesar $27,642$ dengan tingkat signifikan $0,000$, dikarenakan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah) memiliki pegawai yang berkualitas dalam mengelola anggaran untuk kabupaten daerah masing-masing dan anggaran yang dikelola digunakan sesuai dengan harapan dan dilihat dari anggaran yang dimiliki untuk masing-masing daerah ini bisa menjanjikan untuk membangun atau meningkatkan setiap daerah masing-masing kabupaten serta penempatan para pegawainya sesuai dengan kemampuan masing-masing para pegawai.

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Pada pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota Se-Sulawesi Tengah ini memiliki anggaran yang bisa digunakan dalam mengembangkan Sulawesi Tengah ini. Dapat dilihat saja Sulawesi Tengah mulai maju dengan adanya banyak pembangunan hotel-hotel yang bisa meningkatkan PAD khususnya dibidang pajaknya. Begitu pun dengan pertumbuhannya setiap tahunnya PDRB setiap kabuapten meningkat dengan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar yang dihasilkan oleh suatu daerah. Ditambah lagi dengan infrastruktur belanja modal yang berjalan dengan baik serta dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang membantu dalam tahap memajukan Sulawesi Tengah.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Anggiat Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal pada (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah)

Variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh PDRB berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal (Survey pada pemerintah kabupaten dan kota Se-Sulawesi Tengah), hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar $0,024$ lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan sebesar $0,05$ dan t hitungnya sebesar $-2,357$. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Darwanto (2007) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh

anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanjamodal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah)

Berdasarkan hasil penelitian ini Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,703 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar - 0,385. Artinya Pendapatan Asli Daerah kurang memiliki pengaruh yang nyata terhadap Belanja Modal dan hubungannya negatif.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Yustikasari dan Darwanto (2007) yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerahnya berpengaruh signifikan terhadap belanja modal akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno putro sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah kabupaten dan kota Se-Sulawesi Tengah perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan untuk belanja modal serta setiap kabupaten memiliki sumber daya manusia yang sangat kurang sehingga dari hasil penelitian ini sangat sesuai bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal (Survey pada pemerintah kabupaten dan kota Se-Sulawesi Tengah) karena setiap daerah memiliki karakteristik dan personal yang berbeda serta tingkat kemandiriannya masih kurang dan setiap kabupaten memiliki potensi yang berbeda.

Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya dari pada untuk membiayai belanja modal, selain itu peningkatan PAD suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah serta memiliki kondisi geografis yang berbeda, jumlah penduduk, keadaan demografis

yang beragam dan sebagainya. Namun kembali lagi tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah)

Pada penelitian ini Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan kuat terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hubungan positif yang kuat antara DAU dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibayar oleh DAU tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pada pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota Sulawesi Tengah adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bahkan Abdullah dan Halim (2006;26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD.

Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan untuk membiayai belanja modal dan memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan yang dimiliki daerah wajib dialokasikan secara tepat dan terarah dalam membiayai belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota se-sulawesi tengah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah)

Berdasarkan hasil penelitian ini Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingkat signifikan sebesar 0,348 lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 0,952. Artinya Dana Alokasi Khusus kurang memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal.

DAK adalah merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002) dalam Idhamsya (2011). Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

Dana alokasi khusus Sulawesi Tengah belum digunakan sesuai dengan bidang-bidangnya melainkan digunakan pada hal-hal yang bukan bidang-bidang dana alokasi khusus. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Anggiat Situngkir (2009) bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan bahwa Dana Alokasi Khusus belum sepenuhnya digunakan tepat sasaran. Dana Alokasi Khusus yang dimiliki Sulawesi Tengah berfluktuasi sehingga dana alokasi khususnya perlu penambahan bidang untuk menunjang komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK namun baru dua tahun terakhir ini ada dana bidang trasportasinya, untuk kepada daerah diwajibkan dana pendamping dalam APBD, sekurang-kurangnya 10 persen dari besaran alokasi DAK yang diterima Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN

Simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Survei pada pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah).

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal (Survei pada pemerintah kabupaten dan kota Se-sulawesi tengah)

Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal (Survei pada pemerintah kabupaten dan kota Se-sulawesi tengah)

Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Survei pada pemerintah kabupaten dan kota Se- sulawesi tengah)

Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal (Survei pada pemerintah kabupaten dan kota Se-sulawesi tengah).

SARAN

Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang agar dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel dari luar Sulawesi Tengah atau seluruh Indonesia dengan menambah periode pengamatan.

Peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal seperti silpa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu. Bengkulu. 4-5 Oktober 2004.
- Anggiat Situngkir, 2009. pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada pemko/pemkab sumatera utara, Tesis. Magister Sains Program Akuntansi. Medan
- Bati, 2009, Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara, Tesis. Magister Ekonomi Pembangunan USU, Medan.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08 No 01. February 2007. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. Bungai Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
- Idhamsya, 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Tesis, Magister Manajemen. Universitas Tadulako. Palu.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suparmoko. M. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi.